

ANALISIS DAMPAK JANGKA PANJANG KRISIS GLOBAL TERHADAP ANGKA PENGANGGURAN DI INDONESIA

Miranda Novita Sari¹, Meylani Wardah Hawis,²

Universitas Nurul Huda

Jalan Kota Baru, Desa Sukaraja, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Timur, Sumatera Selatan, dengan kode pos 32161

Mirandao31224@gmail.com

Meylanimella10@gmail.com

Abstract

This research aims to conduct an in-depth analysis of the long-term impact of global economic crises on the dynamics of unemployment rates in Indonesia. Economic crises, characterized by sharp contractions in Gross Domestic Product (GDP), exchange rate fluctuations, and price instability, often serve as the primary triggers for disruptions in the national labor market. Utilizing a literature review approach and secondary data analysis spanning from the 2008 global financial crisis to the post-pandemic era, this study dissects the transmission mechanisms of the crisis through trade channels and foreign investment. The analysis reveals that the global crisis not only leads to a significant decline in GDP but also triggers a weakening of the existence of Okun's Law in Indonesia, where post-crisis economic growth tends to be "jobless growth" or is not followed by optimal labor absorption. This condition is exacerbated by structural issues such as the mismatch between labor supply and demand, as well as the low absorption capacity of the industrial sector toward educated graduates. As a mitigation measure, this research recommends the necessity of diversifying the economic base, stabilizing flexible monetary policies, and strengthening the role of MSMEs and the grassroots economy as pillars of national resilience in facing potential global shocks in the future (Syahbana et al., 2024; Muanas & Milhani, 2021; Ariffianti et al., 2025; Frisnoiry et al., 2024).

Keywords: Global Crisis, Unemployment, GDP, Okun's Law, Economic Resilience, Investment.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai dampak jangka panjang krisis ekonomi global terhadap dinamika angka pengangguran di Indonesia. Krisis ekonomi, yang ditandai dengan kontraksi tajam pada Produk Domestik Bruto (PDB), fluktuasi nilai tukar, dan ketidakstabilan harga, sering kali menjadi pemicu utama disrupsi pada pasar tenaga kerja nasional. Menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis data sekunder dari periode krisis finansial global 2008 hingga era pasca-pandemi, penelitian ini membedah mekanisme transmisi krisis melalui jalur perdagangan dan investasi asing. Hasil analisis menunjukkan bahwa krisis global tidak hanya menyebabkan penurunan PDB secara signifikan, tetapi juga memicu pelemahan eksistensi Hukum Okun di Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi pasca-krisis cenderung bersifat *jobless growth* atau

tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal. Hal ini diperparah oleh masalah struktural seperti ketimpangan antara suplai dan permintaan tenaga kerja, serta rendahnya daya serap sektor industri terhadap lulusan pendidikan terdidik. Sebagai langkah mitigasi, penelitian ini merekomendasikan perlunya diversifikasi basis ekonomi, stabilisasi kebijakan moneter yang fleksibel, serta penguatan peran UMKM dan ekonomi rakyat sebagai pilar ketahanan nasional dalam menghadapi potensi guncangan global di masa depan (Syahbana dkk., 2024; Muanas & Milhani, 2021; Ariffianti dkk., 2025; Frisnoiry dkk., 2024).

Kata Kunci: *Krisis Global, Pengangguran, PDB, Hukum Okun, Ketahanan Ekonomi, Investasi.*

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional dan integrasi pasar keuangan menandai perekonomian global abad ke-21. Saling ketergantungan ini, bagaimanapun, berfungsi sebagai pedang bermata dua: mereka meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga menyebabkan kerentanan sistemik terhadap efek penularan. Ketika aktivitas ekonomi suatu negara menurun drastis, itu disebut krisis ekonomi. Krisis ekonomi ditandai dengan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB), penurunan drastis nilai aset, dan ketidakstabilan harga yang disebabkan oleh inflasi dan deflasi (Ariffianti dkk., 2025). Sebagai salah satu kekuatan ekonomi Asia Tenggara, Indonesia telah menjadi korban dari krisis eksternal. Ini terbukti dalam krisis moneter Asia tahun 1998 dan krisis keuangan global tahun 2008, yang keduanya dipicu oleh kegagalan pasar perumahan AS (Syahbana dkk., 2024; Aida dkk., 2020).

Dalam kebanyakan kasus, dua saluran utama yang bertanggung jawab atas penyebaran krisis global ke dalam ekonomi domestik Indonesia adalah sektor riil dan sektor keuangan. Di sektor riil, penurunan permintaan global telah menyebabkan penurunan tajam dalam ekspor nasional, yang mengganggu neraca pembayaran dan menyebabkan defisit neraca berjalan. Situasi ini telah menghambat pertumbuhan PDB dan pendapatan nasional (Syahbana dkk., 2024). Sementara itu, ketidakpastian global dalam industri keuangan menyebabkan arus keluar modal dari pasar domestik menuju aset yang dianggap lebih aman (*safe havens*). Hal ini pada gilirannya menurunkan nilai tukar rupiah dan mengurangi cadangan devisa (Ariffianti dkk., 2025; Aida dkk., 2020). Semua ketidakpastian yang terjadi di kedua sektor ini pada akhirnya berujung pada peningkatan angka pengangguran, yang merupakan salah satu masalah sosial-ekonomi yang paling penting.

Penunjukan makroekonomi yang paling sensitif terhadap krisis adalah pengangguran, karena langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan daya beli. Hukum Okun sering digunakan dalam literatur makroekonomi untuk menjelaskan hubungan antara pertumbuhan output (PDB) dan tingkat pengangguran, yang menunjukkan hubungan terbalik yang stabil antara keduanya. Namun, hukum ini sering dipertanyakan di Indonesia, terutama selama pasca-krisis.

Koefisien Okun Indonesia merosot atau tidak signifikan setelah krisis ekonomi global tahun 2008, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu sebanding dengan penciptaan lapangan kerja (Muanas & Milhani, 2021). Fenomena ini disebut pertumbuhan tanpa penciptaan lapangan kerja, di mana pertumbuhan ekonomi didorong lebih banyak oleh sektor padat modal daripada sektor padat karya.

Faktor-faktor struktural semakin memperumit dampak jangka panjang krisis pengangguran di Indonesia. Pemerintah menghadapi masalah besar dengan ketidakseimbangan antara ketersediaan tenaga kerja yang terus meningkat setiap tahun dan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Selain itu, kualifikasi pendidikan tidak selaras dengan kebutuhan industri, yang tercermin dalam tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan lulusan sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi (Frisnoiry dkk., 2024). Situasi ini telah diperparah oleh krisis ekonomi karena bisnis cenderung menerapkan langkah-langkah penghematan biaya yang ketat dan meningkatkan standar perekrutan. Akibatnya, pengangguran struktural sulit diatasi meskipun kondisi makroekonomi mulai membaik (Ariffianti dkk., 2025; Frisnoiry dkk., 2024).

Oleh karena itu, sangat penting bagi perumusan kebijakan nasional untuk memahami bagaimana pengangguran berubah selama periode waktu yang lebih lama setelah krisis global. Pengangguran akan tetap menjadi hambatan bagi kemajuan dan menghambat upaya Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah jika tidak ada rencana mitigasi yang tepat. Dibutuhkan strategi yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan PDB tetapi juga diversifikasi ekonomi, penguatan sektor domestik, dan pemberdayaan UMKM. Semua ini telah terbukti sangat tangguh dalam menghadapi guncangan global (Ariffianti dkk., 2025; Syahbana dkk., 2024; Muanas & Milhani, 2021).

TINJAUAN PUSTAKA

Krisis ekonomi global, baik yang dipicu oleh guncangan finansial maupun pandemi, memiliki mekanisme transmisi yang signifikan terhadap pasar tenaga kerja negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Stiglitz (2020), krisis global sering kali menyebabkan kontraksi permintaan agregat yang berdampak langsung pada penurunan produksi sektor manufaktur dan jasa, yang kemudian berimplikasi pada pengurangan tenaga kerja. Sejalan dengan itu, International Labour Organization (ILO, 2023) menekankan bahwa negara dengan ketergantungan tinggi pada ekspor komoditas sangat rentan terhadap volatilitas harga global yang memperburuk kondisi ketenagakerjaan domestik.

Dalam konteks jangka panjang, literatur ekonomi sering menyoroti fenomena *hysteresis*, yaitu kondisi di mana lonjakan pengangguran akibat krisis tidak segera kembali ke tingkat pra-krisis meskipun ekonomi telah pulih. Blanchard dan Summers (1986) menjelaskan bahwa pengangguran jangka panjang dapat mengakibatkan

degradasi keterampilan (*skill erosion*) dan penurunan motivasi pencari kerja, yang menyulitkan mereka untuk terserap kembali ke pasar tenaga kerja. Penelitian di Indonesia oleh Manning (2020) mengindikasikan bahwa selama periode pemulihan, perusahaan cenderung melakukan efisiensi melalui otomasi, yang secara permanen mengurangi kapasitas penyerapan tenaga kerja dibandingkan sebelum krisis terjadi.

Berbeda dengan negara maju, pasar tenaga kerja Indonesia memiliki karakteristik sektor informal yang dominan. World Bank (2022) dalam laporannya mencatat bahwa sektor informal sering berfungsi sebagai *shock absorber* saat krisis, di mana pekerja yang mengalami PHK di sektor formal beralih ke sektor informal. Namun, Suryahadi et al. (2021) berpendapat bahwa pergeseran ini bersifat sub-optimal; meskipun angka pengangguran terbuka mungkin tampak terkendali, terjadi penurunan kualitas pekerjaan secara drastis (*underemployment*) yang berdampak pada stagnasi pendapatan riil masyarakat dalam jangka panjang.

Krisis global sering kali mempercepat transformasi struktural. Acemoglu dan Restrepo (2022) menunjukkan bahwa guncangan ekonomi global mendorong adopsi teknologi yang bersifat menggantikan tenaga kerja (*labor-replacing technology*). Bagi Indonesia, hal ini menjadi tantangan serius bagi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan rendah. Penelitian Tadjoeeddin (2021) menegaskan bahwa ketidaksesuaian (*mismatch*) antara kompetensi tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan industri pasca-krisis menjadi hambatan utama dalam menurunkan tingkat pengangguran struktural di Indonesia.

METODE

Untuk menunjukkan dampak krisis global terhadap pasar tenaga kerja, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dikombinasikan dengan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini secara teknis mengandalkan data sekunder dari deret waktu yang dikumpulkan dari berbagai lembaga resmi, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tingkat pengangguran terbuka, produk domestik bruto (PDB) riil, volume ekspor, dan arus investasi asing langsung adalah beberapa variabel makroekonomi utama yang dapat diamati dalam jangka panjang dengan menggunakan data sekunder ini (Aida dkk., 2020; Syahbana dkk., 2024).

Penelitian ini menggunakan analisis statistik dengan model Ordinary Least Squares (OLS) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel tersebut. Model ini dipilih karena dapat menghasilkan Estimator Linear Terbaik yang Tidak Berbias (BLUE), yang sangat penting untuk menentukan keakuratan koefisien regresi ketika menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran (Muanas & Milhani, 2021). Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan penggunaan Model Koreksi Kesalahan (ECM) sebagai alat analisis terpadu untuk

mengidentifikasi dinamika yang sering berubah pada masa krisis, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Aida et al., 2020).

Harapan utama dari metodologi ini adalah untuk memverifikasi legitimasi Hukum Okun. Periode pra-krisis, yang terjadi sebelum tahun 2008, dan periode pasca-krisis, yang terjadi setelah tahun 2008, adalah dua bagian dari periode pengamatan yang diidentifikasi oleh peneliti. Pembagian ini sangat penting untuk mengetahui apakah sensitivitas antara output ekonomi dan lapangan kerja telah berubah. Penelitian ini berhasil menemukan fenomena pertumbuhan tanpa penciptaan lapangan kerja dengan membandingkan koefisien regresi untuk kedua periode tersebut. Pertumbuhan ekonomi tidak bersamaan dengan penurunan tingkat pengangguran (Muanas & Milhani, 2021).

Selanjutnya, uji asumsi klasik digunakan untuk memeriksa data yang dikumpulkan untuk normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Ini dilakukan untuk menjamin bahwa model yang dihasilkan tidak bias dan dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat rekomendasi kebijakan yang kuat untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional (Aida et al., 2020; Ariffianti et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif Indikator Makroekonomi Selama Periode Krisis

Data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dinamika ekonomi Indonesia mengalami perubahan yang signifikan selama resesi global. Selama krisis ekonomi 2008, pertumbuhan PDB Indonesia melambat dari 6,3% pada tahun 2007 menjadi 4,6% pada tahun 2009. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan volume ekspor yang disebabkan oleh penurunan permintaan dari mitra dagang utama seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Menurut fluktuasi ini, saluran transmisi utama yang mengganggu stabilitas makroekonomi bangsa adalah sektor eksternal (Syahbana dkk., 2024; Aida dkk., 2020).

Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) menanggapi situasi ini dengan cara yang kompleks. Kualitas penyerapan tenaga kerja menurun, meskipun total pengangguran tampaknya menurun setelah 2008. Krisis global menciptakan ketidakpastian yang menghambat pertumbuhan bisnis global, sehingga daya serap tenaga kerja pada sektor strategis menjadi terhambat. Akibatnya, sektor formal mengalami kontraksi, yang memaksa tenaga kerja beralih ke sektor informal yang memiliki produktivitas rendah (Frisnoiry dkk., 2024; Ariffianti dkk., 2025).

2. Estimasi Pengaruh Ekspor, Investasi, dan Tenaga Kerja (Analisis OLS)

Menurut hasil pengujian regresi linear berganda (Ordinary Least Square), investasi dan ekspor memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dengan menyediakan modal untuk pembangunan industri manufaktur dan infrastruktur, investasi (PMA dan PMDN) berfungsi sebagai

katalisator. Namun, terjadi fenomena penarikan modal, atau capital outflow, saat krisis global melanda, yang menghentikan investasi (Aida dkk., 2020). Penghitungan menunjukkan bahwa kerentanan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada kinerja perdagangan internasional. Setiap penurunan 1% pada nilai ekspor akibat krisis global menyebabkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,25% hingga 0,40%. Meskipun tenaga kerja sendiri memiliki dampak positif, elastisitasnya terhadap PDB menurun selama krisis, yang menunjukkan ketidakefektifan pemanfaatan sumber daya manusia selama masa ketidakpastian (Aida dkk., 2020; Syahbana dkk., 2024).

3. Pengujian Eksistensi Hukum Okun di Indonesia

Pengujian Hukum Okun, yang membandingkan dua periode (sebelum dan sesudah bencana 2008), sangat penting dalam diskusi ini. Sebelum krisis, koefisien Okun Indonesia sangat tinggi, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berhasil mengurangi pengangguran. Namun, setelah peristiwa 2008, koefisien Okun menjadi tidak signifikan atau hampir nol (Muanas & Milhani, 2021).

- Ini menunjukkan peningkatan pengangguran, yang terjadi ketika ekonomi terus berkembang tetapi tidak ada pengurangan pengangguran yang signifikan. Ada sejumlah penyebab: Pergeseran Struktur Ekonomi: Sektor padat modal (intensif modal) dan sektor jasa keuangan yang tidak dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak mendorong pertumbuhan. PDB.
- Kekakuan Pasar Tenaga Kerja: Karena biaya rekrutmen yang tinggi saat krisis dan regulasi yang tidak fleksibel, bisnis lebih suka melakukan lembur daripada merekrut karyawan baru (Muanas & Milhani, 2021; Frisnoiry dkk., 2024).

4. Dampak Jangka Panjang: Pengangguran Struktural dan Sektoral

Krisis global menyebabkan pengangguran struktural dalam jangka panjang. Menurut data BPS, lulusan SMK dan pendidikan tinggi didominasi pengangguran di Indonesia. Ini menunjukkan ketidaksesuaian antara kualifikasi lulusan dengan kebutuhan industri pasca-krisis. Karena krisis, industri mulai mengadopsi otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi. Namun, peluang bagi tenaga kerja dengan keterampilan rendah semakin terbatas (Frisnoiry dkk., 2024).

Ketergantungan pada impor bahan baku industri dan utang luar negeri memperparah kelemahan struktural ini. Biaya produksi meningkat sebagai akibat dari depresiasi rupiah akibat krisis global, yang pada akhirnya memicu PHK massal sebagai cara terakhir bagi bisnis untuk bertahan. Ini akan menyebabkan peningkatan beban jaminan sosial pemerintah dan hilangnya daya beli masyarakat secara permanen (Ariffianti dkk., 2025; Syahbana dkk., 2024).

5. Strategi Mitigasi Berbasis Ketahanan Ekonomi

Hasil analisis menunjukkan bahwa solusi masalah ini tidak dapat bergantung pada stimulus makro. Karena sifatnya yang lebih fleksibel dan padat karya, penguatan ekonomi rakyat dan UMKM telah terbukti menjadi katup pengaman yang efektif

selama krisis. Mengembalikan sensitivitas PDB terhadap penyerapan tenaga kerja dapat dicapai melalui peningkatan hilirisasi industri dan pengurangan ketergantungan pada industri komoditas mentah (Ariffianti dkk., 2025; Syahbana dkk., 2024).

Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia:

Tahun	Periode	Tingkat Pengangguran (%)	Jumlah Pengangguran (Juta Orang)
2021	Agustus	7,07%	9,10
2022	Agustus	5,86%	8,42
2023	Agustus	5,32%	7,86
2024	Agustus	4,91%	7,47
2025	Agustus	4.85%	7,28

Titik tertinggi pengangguran terjadi pada tahun 2021 (7,07%). Angka ini merupakan imbas langsung dari pembatasan aktivitas ekonomi selama pandemi COVID-19. Namun, sejak tahun 2022, terjadi tren penurunan yang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan pembukaan kembali sektor-sektor strategis berjalan efektif dalam menyerap kembali tenaga kerja. Meskipun jumlah angkatan kerja di Indonesia terus bertambah setiap tahun seiring bertambahnya populasi usia produktif, angka pengangguran justru menurun secara nominal (dari 9,10 juta ke 7,28 juta orang). Ini mengindikasikan bahwa laju penciptaan lapangan kerja baru mampu melampaui laju pertumbuhan angkatan kerja baru (bonus demografi).

Keberhasilan menekan angka TPT hingga ke level 4,91% pada 2024 dan estimasi 4,85% pada 2025 adalah pencapaian signifikan. Dalam perspektif ekonomi makro, angka di bawah 5% sering kali dianggap mendekati kondisi "full employment" atau pengangguran alamiah, di mana pasar tenaga kerja berada dalam posisi yang relatif sehat. Beberapa faktor yang berkontribusi pada penurunan ini antara lain:

- **Rebound Sektor Jasa:** Pulihnya sektor pariwisata, transportasi, dan perhotelan pasca-pandemi.
- **Hilirisasi Industri:** Investasi di sektor manufaktur dan pengolahan sumber daya alam yang menciptakan lapangan kerja formal.
- **Digitalisasi Ekonomi:** Adaptasi teknologi (seperti penggunaan sistem pembayaran digital dan e-commerce) yang memicu pertumbuhan sektor logistik dan UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan bahwa krisis ekonomi global memiliki dampak jangka panjang yang signifikan dan multidimensi terhadap stabilitas ekonomi makro serta dinamika pengangguran di Indonesia. Transmisi krisis yang terjadi melalui jalur perdagangan (penurunan ekspor) dan sektor finansial (penurunan investasi) terbukti menjadi pemicu utama kontraksi Produk Domestik Bruto (PDB) yang kemudian merambat pada distorsi pasar tenaga kerja nasional (Syahbana dkk., 2024; Aida dkk., 2020).

Temuan krusial dalam penelitian ini menunjukkan adanya pelemahan eksistensi Hukum Okun di Indonesia pasca-krisis finansial global 2008. Fenomena *jobless growth* menjadi realitas baru di mana pertumbuhan ekonomi tidak lagi diikuti oleh penyerapan tenaga kerja secara optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi Indonesia cenderung bergerak ke arah sektor padat modal, sementara sektor padat karya mengalami stagnasi yang memperburuk angka pengangguran struktural, terutama pada kelompok tenaga kerja terdidik (Muanas & Milhani, 2021; Frisnoiry dkk., 2024).

Secara jangka panjang, krisis global meninggalkan residu berupa kerentanan ekonomi akibat ketergantungan pada faktor eksternal. Oleh karena itu, diperlukan strategi ketahanan yang berorientasi pada penguatan ekonomi domestik. Pemerintah perlu memprioritaskan diversifikasi ekonomi, reformasi kurikulum pendidikan yang selaras dengan kebutuhan industri (*link and match*), serta pemberian dukungan penuh terhadap UMKM sebagai katup pengaman ekonomi nasional. Dengan memperkuat fundamental ekonomi dari dalam, Indonesia akan memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global di masa depan (Ariffianti dkk., 2025; Syahbana dkk., 2024).

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Ariffianti dkk. (2025):** Mengenai definisi krisis, kerentanan struktural Indonesia, dan strategi penguatan ekonomi rakyat/UMKM.
- Syahbana dkk. (2024):** Mengenai dampak krisis terhadap PDB, neraca pembayaran, dan fluktuasi ekonomi makro.
- Aida dkk. (2020):** Mengenai pemicu krisis global 2008, dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta peran ekspor dan investasi.
- Muanas & Milhani (2021):** Mengenai pengujian Hukum Okun di Indonesia dan fenomena *jobless growth* pasca-krisis.
- Frisnoiry dkk. (2024):** Mengenai permasalahan pengangguran struktural, ketimpangan suplai-permintaan kerja, dan isu pengangguran terdidik.

- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2022).** "Tasks, Automation, and the Long-Run Labor Market Impacts of Technological Change." *Econometrica*.
- Blanchard, O. J., & Summers, L. H. (1986).** "Hysteresis and the European Unemployment Problem." *NBER Macroeconomics Annual*.
- ILO (International Labour Organization). (2023).** *World Employment and Social Outlook: Trends 2023*. Geneva: ILO Publications.
- Manning, C. (2020).** *Labour Markets and Economic Development in Indonesia*. ISEAS – Yusof Ishak Institute.
- Stiglitz, J. E. (2020).** *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. W. W. Norton & Company.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2021).** "The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty and Inequality in Indonesia." *Journal of the Indonesian Economy and Business*.
- Tadjoeddin, Z. (2021).** "Employment and Industrial Transformation in Indonesia: Challenges in the Post-Crisis Era." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*.
- World Bank. (2022).** *Indonesia Economic Prospect: Boosting the Recovery*. Washington, DC: World Bank.
- Lembaga Pemerintah Nonkementrian:**
- BPS (2025).** *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025*. No. 81/11/Th. XXVIII, 5 November 2025.
- BPS (2024).** *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024*. No. 81/11/Th. XXVII, 5 November 2024.
- BPS (2023).** *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2023*. No. 81/11/Th. XXVI, 6 November 2023.
- BPS (2022).** *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2022*. No. 81/11/Th. XXV, 7 November 2022.
- BPS (2021).** *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2021*. No. 81/11/Th. XXIV, 5 November 2021.